ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Standar Penentuan Upah Penitipan Gadai Emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya". Ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dan bagaimanakah standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam ?

Data penelitian diperoleh lewat teknik interview dan studi pustaka. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analisis verifikatif, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya yang bersifat umum kemudian dianalisis dengan hukum Islam. Selanjutnya kesimpulannya diambil melalui pola pikir deduktif.

Hasil penulisan ini menemukan bahwa PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dalam praktik gadai emas menggunakan 3 akad, yakni akad *qarḍ, rahn* dan *ijārah*. Penetapan biayanya meliputi biaya administrasi, materai, dan biaya simpan. Dalam penentuan upah penitipannya PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya menggunakan akad *ijārah* dengan sistem perhitungan persentase. Besaran persentasenya adalah 1,6 % dari nilai taksiran harga emas yang ada di pasaran dan untuk maksimum pembiayaan gadai emas sebesar 93% untuk emas lantakan dan 80% untuk emas perhiasan.

Standar penentuan upah penitipan barang gadai dengan sistem persentase ini bertentangan dengan hukum Islam, karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan yang bisa berpotensi menjadi riba. Hal ini dikarenakan dalam penentuannya, sistem persentase ini bersifat fluktuatif mengikuti harga emas di pasaran. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan biaya yang sudah menjadi ketetapan di awal akad dan menimbulkan ketidakjelasan pada nasabah tentang besaran upah penitipannya, sehingga menurut pandangan hukum Islam, standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Surabaya ini mengandung unsur keharaman atau riba.

Standar penentuan upah penitipan gadai yang merupakan kumpulan dari biaya-biaya yang menjadi kewajiban nasabah harus ditentukan secara jelas diawal akad agar tidak menimbulkan ketidakjelasan pada nasabah dan menghindari unsur penambahan yang terbebas dari riba. Sebaiknya, bank menggunakan sistem *deposit box* atau menggunakan sistem penetapan biaya secara nominal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id